

ABSTRAK

Maya Nur Indah Sari (01659220058)

SINKRONISASI HUKUM PENGURUSAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI DI INDONESIA

(xiii + 149 halaman: 5 gambar + 6 tabel)

Pemerintah berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui *e-government* dengan tujuan penataan sistem perizinan di Indonesia, terutama pada sektor industri di mana memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem perizinan yang semula diselenggarakan secara konvensional berkembang menjadi sistem perizinan berbasis risiko yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: (a) bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan sinkronisasi hukum perizinan usaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri di Indonesia; dan (b) bagaimana kemudahan berusaha yang didapatkan dari pengurusan perizinan usaha berbasis risiko bagi pelaku usaha industri apabila ditinjau dari konsep *welfare state*. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris. Metode pengumpulan data studi lapangan dan studi kepustakaan dengan jenis pendekatan terhadap asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, serta sifat analisis yang berdasarkan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021, pemerintah telah melakukan sinkronisasi hukum terkait penyelenggaraan perizinan pada sektor industri melalui PP No. 46/2023 tentang Perubahan atas PP No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Permenperin No. 9/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian, dan PP No. 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Hal ini menunjukkan terkait dengan implementasi penguatan ekosistem investasi sektor perindustrian dan pemerataan penyelenggaraan perizinan di Indonesia yang merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*) dalam bentuk pemberian pelayanan publik berdasarkan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam rangka meningkatkan *ease of doing business*.

Referensi: 72 (2006-2023)

Kata Kunci: perizinan berusaha berbasis risiko, kemudahan berusaha, usaha industri

ABSTRACT

Maya Nur Indah Sari (01659220058)

Synchronization of Laws of Managing Online Single Submission Risk-Based Approach to Provide Convenience for Industrial Business Actors in Indonesia

(xiii + 149 pages: 5 figures + 6 tables)

The government is striving to enhance public services through e-government with the aim of organizing the licensing system in Indonesia, especially in the industrial sector, which has the potential to accelerate a country's economic growth. The licensing system, initially conducted conventionally, has evolved into a risk-based licensing system administered by the central government (Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal) and Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) at the provincial and municipal levels. The problems in this research are: (a) how the government endeavors to synchronize Online Single Submission Risk-Based Approach for industrial business actors in Indonesia; and (b) the ease of doing business gained from managing Online Single Submission Risk-Based Approach for industrial business actors when viewed from the concept of a welfare state. This research adopts a normative-empirical. The data collection methods include field studies and literature studies an approach focused on legal principles, legal systematics, legal synchronization, by using qualitative analysis. The results of this research is based on Government Regulation No. 5/2021, the government has synchronized laws regarding licensing administration in the industrial sector through Government Regulation No. 46/2023 regarding changes to Government Regulation No. 28/2021 of Implementation of the Industrial Sector, Regulation of Indonesia Ministry of Industry No. 9/2021 of Concerning Standards for Business Activities and/or Products in the Implementation of Online Single Submission Risk-Based Approach in the Industrial Sector, and Government Regulation No. 6/2021 of Implementation of Business Licensing in the Local Government. This demonstrates alignment with the implementation of strengthening the investment ecosystem in the industrial sector and the equitable administration of licensing in Indonesia, which represents one of the government's measures to realize a welfare state in the form of providing public services based on the fundamental principles of good governance to enhance ease of doing business.

References: 72 (2006-2023)

Keywords: Online Single Submission Risk-Based Approach, ease of doing business, industrial business